

Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Petani Di Lampung

Abdurohman Muzaki^{1*}, Erlin Kurniati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRACT

Keywords:

Agricultural Policy, Palm Oil, Smallholder Economy, Sustainability

This study aims to analyze oil palm commodity development policies in Lampung Province and their impact on farmers' economy. Palm oil is one of the leading commodities that has an important role in the regional economy, especially for farmers who depend on this agricultural sector. Policies implemented by the government, both at the regional and national levels, play a significant role in determining the direction of the development of the palm oil industry, including in terms of farmer empowerment, natural resource management, and environmental sustainability. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis. Data collection was conducted through in-depth interviews with oil palm farmers, local government officials, and agricultural experts, as well as document analysis related to existing policies. The results show that although the oil palm development policy in Lampung has contributed positively to increasing farmers' income, there are several challenges related to fluctuating commodity prices, lack of access to modern agricultural technology, and environmental sustainability issues that still need serious attention. The economic impact on oil palm smallholders is highly dependent on the stability of policies that support the sector, as well as the strengthening of distribution systems and training to increase the capacity of farmers. Therefore, a more integrative policy is needed that not only focuses on increasing production, but also on better social and environmental welfare for oil palm farmers in Lampung.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Nama: Abdurohman Muzaki

Email: zakiif04@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia saat ini adalah minyak sawit. Berdasarkan status perusahaan-perkebunan rakyat, perkebunan besar negara bagian, dan perkebunan besar swasta-Statistik perkebunan Indonesia 2015-2017 memuat informasi areal, produksi, dan produktivitas di tingkat nasional dan provinsi (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian nasional

adalah kelapa sawit, khususnya sebagai sumber devisa, lapangan kerja, dan pendapatan (Anggraini, Lambelanova, & Ritonga, 2022).

Produk kelapa sawit menyumbang sebagian besar kontribusi sektor perkebunan, terbukti dari ekspor primer komoditas nonmigas. Ekspor minyak sawit menyumbang 27.418,2 USD atau 10,81% dari ekspor nonmigas, menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah batu bara. Namun, beberapa hasil pertanian tidak dikategorikan sebagai komoditas primer. Selain itu, minyak sawit Indonesia merupakan bagian terbesar dari produksi minyak sawit global, yang mencerminkan pentingnya minyak sawit secara signifikan. Indonesia terus memimpin dunia dalam produksi minyak sawit pada tahun 2022, terhitung 46,50 juta ton, disusul Malaysia dengan 19,80 juta ton. Kurang dari 3,26 juta ton ditemukan di negara lain (Badan Pusat Statistik, 2023).

Organisasi Pangan dan Pertanian melaporkan bahwa Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan Malaysia berada di urutan kedua. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia karena areal tanamnya yang luas dan hasil produksi yang tinggi. Usaha perkebunan kelapa sawit terbesar meliputi perkebunan rakyat kecil, perkebunan swasta besar, dan perkebunan negara. Pada tahun 2019, perkebunan kelapa sawit Indonesia mencakup 14,68 juta hektare, termasuk 755 ribu hektare perkebunan besar bangsa. Ini merupakan pertumbuhan 2,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaku kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perusahaan swasta dengan luas lahan sebesar 7,7 juta hektare (ha) atau 54% dari total luas lahan kelapa sawit di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit mencakup total 14.326.350 hektar pada tahun 2018. Sebanyak 7.892.706 hektare atau 55,09% dari luas areal perkebunan kelapa sawit sebagian besar ditangani oleh perusahaan swasta besar (PBS). Pada tahun 2018, terdapat 3.417.951 hektare kelapa sawit, dengan perkebunan rakyat (PR) menempati hampir 99% dari luas areal. Perkebunan Negara Besar (PBN) hanya menyumbang 614.756 hektare atau 4,29% dari luas areal kelapa sawit secara keseluruhan, sedangkan perkebunan rakyat menempati urutan kedua dalam hal kontribusinya terhadap total areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu 5.818.888 hektare atau 40,62% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020).

Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada pertanian untuk keberadaan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan saat ini agar barang-barang pertanian Indonesia semakin canggih dan berkembang. Tentunya Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam provinsi, termasuk provinsi Lampung. Kelapa sawit ditanam di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Lampung, yang memiliki iklim, jenis tanah, dan luas lahan yang sesuai untuk tanaman tersebut. Industri perkebunan diantisipasi akan menjadi sumber pendapatan utama bagi warga Provinsi Lampung dan akan mendorong perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, terlihat luas areal perkebunan kelapa sawit di provinsi Lampung sebesar 237.021 ha dengan produksi sebesar 546.242 ton, sehingga terlihat rata-rata produksi sebesar 43,39 ha / ton (Badan Pusat Statistik, 2023).

Industri kelapa sawit di Lampung melibatkan banyak pelaku, termasuk petani swadaya dan petani plasma, yang sebagian besar tergolong dalam kategori petani kecil. Keterlibatan mereka menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya dari sisi pendapatan rumah tangga, tetapi juga dalam penguatan ekonomi desa melalui aktivitas produksi, distribusi, dan pengolahan hasil. Petani kecil ini juga merupakan bagian penting dari rantai pasok karena mereka menyuplai tandan buah segar (TBS) kepada perusahaan pengolah dan koperasi yang menjadi mitra industri.

Meskipun potensi kelapa sawit sangat besar, pengelolaan sektor ini menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Dari sisi kebijakan, tantangan mencakup koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, ketimpangan akses terhadap program bantuan, dan kurangnya integrasi antara petani kecil dan pelaku industri besar. Sementara itu, dari sisi pasar, harga sawit

yang fluktuatif di pasar global membuat pendapatan petani tidak stabil. Selain itu, tuntutan terhadap praktik pertanian berkelanjutan (*sustainability*) juga menimbulkan tekanan terhadap petani yang belum memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk memenuhi standar lingkungan.

Pemerintah telah menyusun sejumlah kebijakan yang mencakup program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), subsidi sarana produksi, pelatihan teknik budidaya berkelanjutan, dan insentif untuk praktik agribisnis ramah lingkungan. Di tingkat daerah, kebijakan ini diterjemahkan melalui kerja sama dengan dinas perkebunan, koperasi tani, dan sektor swasta. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi per hektare, memperpanjang umur ekonomi kebun sawit, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani, terutama kelompok petani kecil yang selama ini berada pada posisi marjinal dalam rantai nilai kelapa sawit.

Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain regulasi mengenai pengelolaan lahan, pemberian subsidi, serta program pendampingan teknis untuk petani. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani kelapa sawit, seperti fluktuasi harga, ketimpangan pendapatan antara petani besar dan kecil, serta masalah lingkungan yang timbul akibat praktik-praktik pertanian yang kurang ramah lingkungan.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah dampak kebijakan pengembangan kelapa sawit terhadap ekonomi petani di Lampung. Sebagian besar petani kelapa sawit di Lampung merupakan petani kecil yang mengandalkan tanaman ini sebagai sumber mata pencaharian utama.

Namun, tidak semua petani merasakan manfaat yang signifikan dari kebijakan yang ada. Beberapa petani masih menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi modern, memperoleh harga yang adil, serta dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani kelapa sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan komoditas kelapa sawit yang diterapkan di Provinsi Lampung dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi petani. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan mendorong keberlanjutan sektor kelapa sawit di Lampung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan, ekonomi petani, dan sektor kelapa sawit di Lampung.

BAHAN DAN METODE

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kebijakan pengembangan komoditas kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan realitas yang ada di lapangan serta menganalisis fenomena yang terjadi.

Fadli (2021) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dan mengumpulkan data dari lingkungan alam untuk mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual. Baik metode statistik maupun hitungan tidak digunakan untuk sampai pada hasilnya. Bergantung pada sudut pandang subjek, sifat deskriptif penelitian kualitatif dan kecenderungannya untuk analisis metode induktif cenderung menyoroti proses dan makna. Penelitian kualitatif deskriptif, di sisi lain, bertujuan untuk mendeskripsikan

dan menilai secara metodologis berbagai situasi, fakta, dan sudut pandang (Rusandi & Rusli, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena kelapa sawit menjadi komoditas unggulan yang penting bagi perekonomian daerah, dengan banyak petani kecil yang terlibat dalam budidaya kelapa sawit. Penelitian akan dilaksanakan di beberapa kabupaten yang dikenal memiliki sektor perkebunan kelapa sawit yang cukup berkembang.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, sebagai berikut (Moleong, 2007):

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan dengan informan yang relevan untuk menggali informasi terkait kebijakan pengembangan kelapa sawit, serta dampaknya terhadap petani. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menjawab pertanyaan dan penggalian informasi yang lebih mendalam.
2. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah, laporan tahunan, dan data statistik yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari wawancara.

Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Analisis tematik merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menemukan, mengkaji, dan menyajikan data sebagai tema atau pola dalam bentuk interpretasi dan kesimpulan. Pengkodean, pengurutan data, dan pengelompokan data adalah tiga teknik dasar dalam analisis tema yang dapat menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam (Adelliani, Sucirahayu, & Zanjabila, 2023).

Akibat banyak analisis tema hanya menuntut pengetahuan yang belum sempurna, para peneliti dapat memanfaatkannya dengan mudah. Selain itu, teknik ini cenderung mudah beradaptasi dan dapat diterapkan pada berbagai pertanyaan studi. Untuk mengidentifikasi konsep atau ide dari sebuah cerita menggunakan data penelitian terkini, bukan hanya pernyataan yang diperoleh, adalah tujuan dari analisis tema. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut (Adelliani et al., 2023):

1. Penyandian (*Coding*)
Tahap pertama dalam proses analisis data kualitatif ini bertujuan untuk mengorganisasi informasi yang diperoleh dari wawancara menjadi unit-unit makna yang dapat dianalisis secara sistematis. Penyandian dilakukan dengan membaca transkrip wawancara secara mendalam untuk mengidentifikasi kata kunci, frasa, atau pernyataan penting yang berkaitan dengan tema utama penelitian.
2. Kategorisasi
Setelah proses penyandian selesai, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan hasil coding ke dalam kategori yang lebih luas dan bermakna. Kategorisasi bertujuan untuk menyusun struktur analisis yang sistematis agar setiap temuan dapat dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini penting untuk menyaring informasi yang relevan dan memastikan bahwa analisis difokuskan pada aspek-aspek utama dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua temuan yang telah dikategorikan menjadi narasi yang koheren. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna dari pola dan kecenderungan data, serta menilai implikasinya terhadap tujuan dan pertanyaan penelitian. Selain itu, peneliti juga menyusun rekomendasi berbasis temuan untuk memperbaiki kebijakan yang ada, serta menawarkan alternatif pendekatan yang lebih berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan petani di masa depan.

Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memastikan kebenaran informasi yang dikumpulkan dan mengevaluasi keabsahan data. Menurut Susanto et al. (2023), data merupakan bagian penting dari penelitian. Karena data yang diperoleh akan digunakan sebagai sumber analisis data, yang menjadi dasar kesimpulan, maka harus memenuhi persyaratan validitas data. Dengan meminta informan untuk memverifikasi temuan, penyelidikan terhadap peserta penelitian dilakukan untuk memastikan interpretasi peneliti sejalan dengan realitas lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Perkebunan Provinsi Lampung

Berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2022), untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2019-2024 perlu disusun strategi berupa langkah-langkah berisikan program-program indikatif. Strategi yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan mempengaruhi implementasi strategi. Strategi yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan produksi hasil perkebunan yang berkelanjutan;
2. Optimalisasi peningkatan mutu, daya saing produk perkebunan dengan penerapan GMP;
3. Pengembangan komoditas berdasarkan kawasan sentra;
4. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan;
5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), aparatur, petugas dan petani pekebun;
6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana dan inovasi teknologi;
7. Meningkatkan kinerja agribisnis perkebunan.

Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 didukung dengan suatu kebijakan yang tepat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan. Kebijakan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas petani dalam menjalankan usaha taninya dengan memanfaatkan Kartu Petani Berjaya (KPB).
2. Optimalisasi produksi tanaman dengan penerapan teknik budidaya tepat guna, penggunaan benih unggul, penerapan pupuk secara tepat, pengendalian hama penyakit secara terpadu.
3. Meningkatkan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan lahan;
4. Kebijakan pengembangan komoditi berbasis klaster/kawasan dan peningkatan daya saing komoditas unggulan;
5. Kebijakan pengembangan infrastruktur dan agroindustri di kawasan perkebunan;
6. Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit;
7. Mendorong penguatan SDM (petugas/pekebun) dan kelembagaan petani;
8. Mengembangkan pasar produk perkebunan melalui pola kemitraan dengan dunia usaha;
9. Penerapan standarisasi produk secara bertahap;
10. Mendorong percepatan inovasi teknologi perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan;
11. Mendorong percepatan inovasi teknologi pada pascapanen;
12. Peningkatan dan pengembangan pembiayaan usaha dan asuransi perkebunan;

13. Peningkatan dukungan melalui kebijakan dan regulasi.

Kebijakan ini harus dijalankan sebagai komitmen organisasi karena kebijakan akan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakantindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Kebijakan Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit di Lampung

Pengembangan komoditas kelapa sawit di Provinsi Lampung merupakan bagian integral dari strategi pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan petani. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menetapkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta potensi besar dalam mendukung ketahanan energi (melalui pengembangan bioenergi) dan ekspor non-migas.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan dan instansi terkait mengimplementasikan kebijakan pengembangan sawit dengan pendekatan yang mencakup aspek hulu hingga hilir. Kebijakan di sektor hulu mencakup program peremajaan sawit rakyat (PSR), penyediaan bibit unggul bersertifikat, bantuan sarana produksi pertanian (saprota), serta intensifikasi lahan melalui teknologi budidaya yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi dan kelompok tani, yang bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar petani di pasar dan mempercepat akses terhadap program pemerintah.

Pada sektor hilir, pemerintah daerah mendorong investasi dalam industri pengolahan kelapa sawit seperti pabrik CPO (*crude palm oil*) dan produk turunan lainnya. Hal ini ditujukan untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru di daerah. Selain itu, program kemitraan antara petani dan perusahaan besar swasta juga didorong agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan, khususnya dalam aspek pembinaan teknis, pembelian hasil panen, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi dan gudang penyimpanan.

Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi Petani Kelapa Sawit

Dampak kebijakan terhadap ekonomi petani kelapa sawit berdasarkan hasil wawancara dapat dikelompokkan berdasarkan dua perspektif, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

Sebagian petani mengungkapkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti subsidi pupuk dan peningkatan akses terhadap pembiayaan, telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas kelapa sawit mereka. Program subsidi pupuk dirasakan sangat membantu, terutama oleh petani kecil yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk berkualitas secara teratur.

Salah satu petani yang diwawancarai, Bapak L, menyatakan bahwa:

“Dulu kami sering kekurangan pupuk karena harga mahal, tapi sekarang bantuan dari pemerintah cukup meringankan dan tanaman jadi lebih subur.”

Selain itu, program pendampingan teknis dari penyuluh pertanian juga dinilai efektif dalam memberikan wawasan baru mengenai teknik budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik cair dan metode pemangkasan yang tepat. Menurut Ibu T, petani sawit lainnya,

“Penyuluh datang rutin sekarang, kita jadi tahu cara merawat sawit supaya hasilnya bagus, bukan asal tanam saja.”

Kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit juga membawa dampak positif. Kehadiran pabrik pengolahan minyak sawit yang lebih dekat ke sentra kebun mengurangi biaya transportasi dan mempercepat proses penjualan. Hal ini memungkinan

petani menjual tandan buah segar (TBS) dengan harga yang lebih stabil dan kompetitif. Dalam wawancara, Bapak P menuturkan bahwa:

“Dulu hasil panen dibawa ke luar kecamatan, ongkosnya tinggi. Sekarang ada pabrik dekat sini, kami bisa langsung jual dan harganya lebih baik.”

Selain itu, ekspansi pasar dan dukungan promosi oleh pemerintah daerah juga memperluas akses penjualan hingga ke luar daerah, memberikan petani peluang yang lebih luas untuk memasarkan hasil panennya. Kombinasi antara kebijakan hulu (produksi) dan hilir (pengolahan dan pemasaran) ini berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi petani sawit di berbagai wilayah Lampung.

2. Dampak Negatif

Meskipun terdapat sejumlah dampak positif dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perkebunan kelapa sawit, kenyataannya sebagian besar petani kecil masih menghadapi berbagai kesulitan struktural yang cukup serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga kelapa sawit yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global.

Harga tandan buah segar (TBS) dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, membuat pendapatan petani menjadi tidak stabil. Dalam wawancara yang dilakukan, seorang petani bernama Pak R mengungkapkan,

“Kalau harga TBS turun, kami rugi, tapi biaya pupuk dan tenaga tetap tinggi. Tidak seimbang.”

Kondisi ini mempengaruhi daya beli petani serta menurunkan kualitas hidup mereka, terutama saat harga jatuh ke titik terendah.

Kebijakan pemerintah, seperti penetapan harga minimum TBS dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), memang bertujuan untuk memberikan perlindungan, namun belum sepenuhnya efektif di tingkat petani kecil. Implementasinya sering kali tidak merata, terutama di wilayah pedesaan yang akses terhadap informasi dan pengawasan lemah. Selain itu, ketimpangan struktural antara petani besar dan kecil masih sangat mencolok.

Petani besar yang memiliki akses terhadap permodalan, teknologi modern, tenaga kerja terampil, dan jaringan pasar nasional maupun internasional cenderung memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan petani kecil. Akibatnya, terdapat ketimpangan ekonomi yang semakin melebar di antara pelaku usaha sawit. Hal ini berisiko menciptakan eksklusivitas ekonomi terhadap petani kecil dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, termasuk penguatan koperasi petani, akses kredit usaha rakyat (KUR) yang disederhanakan, serta jaminan harga minimum yang dapat dijangkau secara operasional di tingkat lapangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa kebijakan pengembangan kelapa sawit menimbulkan dampak yang kompleks, seperti mampu meningkatkan PAD, pendapatan petani, dan pembangunan sosial ekonomi pedesaan. Namun, di sisi lain, tantangan seperti fluktuasi harga, hambatan ekspor, dan tingginya biaya produksi masih menjadi hambatan utama.

Kebijakan pengembangan kelapa sawit di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siradjuddin (2015), semakin luas lahan yang dikembangkan dan semakin tinggi tingkat produktivitas petani, maka kontribusi sektor ini terhadap PAD juga akan meningkat secara proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong perluasan areal tanam serta peningkatan produktivitas akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan petani.

Implementasi program kebun kelapa sawit rakyat (KKSJR) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah juga memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi kelompok tani. Studi oleh Setiawati et al. (2020) menunjukkan bahwa Program KKSJR tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memberikan dampak sosial seperti peningkatan pengetahuan, penguatan solidaritas sosial melalui program simpan pinjam, serta peningkatan konsumsi rumah tangga yang mencerminkan perbaikan gaya hidup. Ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kemitraan dan pemberdayaan kelompok tani dapat menjadi instrumen efektif dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Meskipun kebijakan pengembangan sawit memberikan peluang ekonomi, petani tetap menghadapi risiko pasar yang tinggi. Sukowati (2022) dalam jurnalnya mencatat bahwa fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) dari tahun ke tahun menjadi bentuk ketidakpastian (*uncertainty*) yang dihadapi petani, terutama karena petani sawit cenderung bersifat *risk averse*. Model Lucas yang digunakan dalam kajian tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga berdampak kecil terhadap kesejahteraan petani (hanya 0,137%), tetapi tetap dapat menimbulkan ketidakstabilan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan stabilisasi harga atau perlindungan pasar bagi petani swadaya agar risiko ekonomi ini dapat diminimalkan.

Pada tingkat global, kebijakan proteksionis dari negara mitra dagang seperti Uni Eropa juga berdampak pada ekonomi petani sawit di Indonesia. Rahayu & Sugianto (2020) menyoroti kebijakan RED II Uni Eropa yang membatasi impor CPO (crude palm oil) dari Indonesia sebagai strategi komersial untuk melindungi pasar domestik mereka, khususnya minyak rapa dan bunga matahari. Kebijakan semacam ini berpotensi menekan harga CPO global dan berdampak pada harga jual TBS di tingkat petani, sehingga memperkuat urgensi diplomasi perdagangan dan kebijakan hilirisasi sawit di dalam negeri.

Di tingkat mikro, kenaikan harga pupuk menjadi salah satu faktor eksternal yang menghambat produktivitas dan pendapatan petani. Hasil penelitian Harahap et al. (2023) mencatat bahwa petani sawit swadaya di Kabupaten Pelalawan harus mengurangi dosis pupuk dan mengganti jenis pupuk akibat tingginya biaya produksi. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dan berdampak langsung pada penurunan hasil panen dan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi atau akses pupuk yang lebih terjangkau menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani sawit.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengembangan kelapa sawit di Lampung dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya:

1. Akses terhadap Teknologi dan Pembiayaan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan kelapa sawit di Lampung adalah keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan sumber pembiayaan yang memadai. Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai program pendampingan dan fasilitasi, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan di lapangan dan kemampuan program tersebut dalam menjangkau seluruh lapisan petani, khususnya petani swadaya.

Teknologi memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani kelapa sawit, seperti penggunaan bibit unggul, sistem irigasi terpadu, dan alat mekanis untuk perawatan kebun maupun panen. Namun demikian, sebagian besar petani kecil di Lampung belum memiliki kapasitas maupun akses terhadap teknologi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan literasi digital petani, kurangnya pelatihan teknis yang bersifat praktis, serta keterbatasan infrastruktur pertanian di tingkat desa.

Selain kendala teknologi, akses terhadap pembiayaan juga menjadi masalah struktural yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan sawit. Banyak petani kesulitan memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, baik karena tidak memiliki agunan, belum terdaftar secara legal dalam kelompok tani resmi, maupun kurangnya pemahaman tentang prosedur administratif perbankan.

Kesenjangan pembiayaan ini menciptakan ketergantungan terhadap tengkulak atau perantara, yang kerap memberikan pinjaman berbunga tinggi dan mengikat petani dalam sistem pemasaran yang merugikan. Kondisi ini memperlemah posisi tawar petani, serta menyulitkan mereka untuk keluar dari jeratan ekonomi subsisten. Meskipun telah ada program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), distribusi program ini belum merata. Banyak petani yang tidak mendapatkan informasi memadai atau gagal memenuhi persyaratan administratif, sehingga tidak dapat memanfaatkan insentif dan bantuan pemerintah secara optimal.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas lahan, tingginya biaya operasional, serta kurangnya daya saing hasil sawit di pasar. Akibatnya, meskipun potensi sumber daya alam sangat mendukung, kontribusi sektor kelapa sawit terhadap peningkatan pendapatan petani masih belum optimal.

2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Petani yang tergabung dalam korporasi besar atau plasma dari perusahaan inti biasanya memiliki keunggulan dalam memperoleh input pertanian seperti bibit unggul, pupuk bersubsidi, alat mekanisasi pertanian, serta akses terhadap informasi teknis dan pasar. Hal ini didukung pula oleh hubungan formal dengan lembaga keuangan dan instansi pemerintah, yang memudahkan mereka mendapatkan program bantuan atau insentif.

Sebaliknya, petani sawit swadaya di Lampung umumnya mengelola lahan dalam skala kecil, dengan modal dan teknologi yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki kelembagaan yang kuat, seperti koperasi atau kelompok tani yang efektif, sehingga kesulitan dalam menjangkau program pemberdayaan yang disediakan pemerintah maupun sektor swasta. Akibatnya, produktivitas kebun sawit petani kecil relatif rendah dan tidak kompetitif.

Petani kecil umumnya hanya berperan sebagai pemasok tandan buah segar (TBS) tanpa keterlibatan dalam proses pengolahan dan pemasaran produk hilir. Mereka menjual hasil panen langsung ke tengkulak atau pengepul dengan harga yang fluktuatif dan cenderung rendah, karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai industri kelapa sawit.

Meski kebijakan nasional dan daerah dalam sektor perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasi di lapangan sering kali lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan modal dan politik. Banyak program pengembangan yang terpusat pada kelompok-kelompok tertentu, sementara petani kecil tidak memperoleh manfaat yang seimbang. Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan kurangnya transparansi dalam pendistribusian bantuan.

Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan disparitas ekonomi, tetapi juga memicu ketegangan sosial, eksklusi kelompok marginal, dan melemahkan kohesi sosial di tingkat komunitas. Petani kecil cenderung merasa tersisih dari proses pembangunan, yang berpotensi menciptakan resistensi terhadap kebijakan maupun program pembangunan jangka panjang.

3. Dampak Lingkungan

Kebijakan pengembangan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, telah berhasil mendorong peningkatan produksi dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun demikian, pendekatan yang terlalu berorientasi pada ekspansi dan

produktivitas sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini mengakibatkan sejumlah dampak ekologis yang signifikan dan menimbulkan dilema dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Salah satu konsekuensi paling mencolok dari perluasan perkebunan kelapa sawit adalah terjadinya deforestasi, yaitu penghilangan tutupan hutan alam untuk dijadikan lahan perkebunan. Di beberapa wilayah Lampung, lahan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan lindung atau penyangga keanekaragaman hayati, telah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Aktivitas ini tidak hanya mengurangi luas hutan, tetapi juga menghancurkan habitat alami berbagai spesies flora dan fauna endemik.

Pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan konservasi tanah menyebabkan degradasi tanah, seperti erosi dan kehilangan unsur hara. Praktik pembakaran lahan atau penggunaan bahan kimia dalam pemupukan turut menyumbang pada penurunan kualitas tanah. Selain itu, limbah dari pabrik kelapa sawit yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air permukaan dan air tanah di sekitar kawasan perkebunan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem perairan.

Kegiatan deforestasi dan pengeringan lahan gambut untuk perluasan kebun sawit juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Proses ini melepaskan karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah ke atmosfer, sehingga memperburuk krisis iklim global. Dengan kata lain, kebijakan pengembangan sawit yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh turut bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim (melalui INDC/NDC).

Konversi ekosistem alami menjadi sistem monokultur kelapa sawit telah menurunkan keanekaragaman hayati secara drastis. Ekosistem yang sebelumnya beragam menjadi homogen, sehingga mengganggu keseimbangan ekologi dan meningkatkan kerentanan terhadap serangan hama serta penyakit. Hal ini mengharuskan penggunaan pestisida secara intensif, yang pada gilirannya memperburuk degradasi lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diperbaiki atau ditambahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Lampung antara lain:

1. Peningkatan Akses Teknologi dan Pembiayaan

Pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Dinas Perkebunan dan lembaga pendidikan vokasi perlu memperluas jangkauan program pendampingan dan penyuluhan berbasis teknologi tepat guna. Materi penyuluhan sebaiknya tidak hanya mencakup teknik budidaya dan pasca-panen, tetapi juga pemanfaatan teknologi irigasi hemat air, penggunaan pupuk organik, serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Pendekatan *participatory extension system* yang melibatkan petani sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran perlu diutamakan agar transfer teknologi lebih efektif.

Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penelitian untuk menyediakan akses terhadap peralatan pertanian yang hemat energi dan ramah lingkungan, seperti mesin pemanen mini, alat semprot otomatis, atau teknologi digital pertanian (*agritech*). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kebijakan pembiayaan perlu didesain ulang agar lebih inklusif bagi petani kecil. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan persyaratan administrasi dalam pengajuan kredit usaha rakyat (KUR);
- b. Pemberian subsidi bunga kredit untuk usaha pertanian berkelanjutan;
- c. Pembentukan koperasi atau lembaga keuangan mikro berbasis komunitas yang dikelola secara transparan;

d. Pelatihan manajemen keuangan kepada petani agar lebih siap dalam mengelola pinjaman.

2. Penguatan Kebijakan Harga Minimum

Pemerintah daerah bersama lembaga penetapan harga seperti Dinas Perkebunan perlu memperkuat regulasi mengenai harga dasar TBS yang mengacu pada standar kualitas dan biaya produksi aktual. Harga minimum ini harus dirancang secara dinamis berdasarkan:

- a. Rata-rata biaya produksi petani sawit skala kecil,
- b. Tren harga pasar internasional CPO,
- c. Margin keuntungan wajar untuk memastikan kelayakan ekonomi petani.

Penetapan harga sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan perwakilan petani, koperasi, serta lembaga independen guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menghindari praktik distorsi harga seperti monopoli, kartel, atau pemotongan harga sepihak oleh tengkulak, diperlukan penguatan fungsi pengawasan oleh pemerintah melalui pembentukan tim pengawas distribusi dan penjualan TBS di tingkat kabupaten/kecamatan, pengembangan sistem digital pelaporan harga oleh petani secara real time, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku industri yang terbukti melakukan penekanan harga secara tidak adil.

Sebagai pelengkap kebijakan harga minimum, pemerintah dapat merancang skema perlindungan pendapatan petani berupa dana stabilisasi harga sawit, subsidi produksi saat harga TBS turun drastis, dan asuransi harga komoditas pertanian sebagai jaminan ketika terjadi guncangan pasar.

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil

Peningkatan kesejahteraan petani kecil dalam sektor kelapa sawit di Lampung memerlukan pendekatan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas kelembagaan petani. Selama ini, petani kecil cenderung terpinggirkan dari rantai nilai industri sawit karena keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif ekonomi yang adil dan berkelanjutan, seperti subsidi input pertanian, dukungan replanting, serta bantuan pasca panen.

Di samping itu, akses pasar harus diperkuat melalui kemitraan antara koperasi petani dan pabrik pengolahan, serta pemanfaatan platform digital untuk distribusi hasil panen secara langsung. Penguatan kelembagaan petani, seperti koperasi dan kelompok tani, juga menjadi aspek penting dalam membangun daya tawar kolektif. Melalui pelatihan manajemen, fasilitasi modal, serta integrasi kelembagaan petani dalam perencanaan pembangunan desa, diharapkan posisi petani kecil dapat diperkuat dalam struktur pasar. Dengan demikian, kebijakan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil secara berkelanjutan.

4. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan kelapa sawit di Lampung. Praktik-praktik seperti konversi lahan hutan dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas tanah, ekosistem, dan biodiversitas. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kelapa sawit harus lebih memperhatikan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Salah satu langkah penting adalah mendorong praktik konservasi tanah dan air, serta melindungi lahan-lahan kritis dengan menghentikan konversi hutan primer dan gambut. Selain itu, untuk mendukung pertanian berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan insentif finansial kepada petani yang mengadopsi sistem agroforestry atau pertanian organik, serta menyediakan pelatihan teknis untuk penggunaan pupuk alami dan pengendalian hama terpadu.

Pengembangan kebijakan ini juga harus melibatkan pendekatan lanskap terintegrasi yang memperhatikan hubungan antara pertanian, hutan, dan pemukiman secara holistik, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan akan mendukung kelangsungan sektor kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekosistem jangka panjang di Lampung.

KESIMPULAN

Kebijakan pengembangan komoditas kelapa sawit di Provinsi Lampung memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi petani, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Meskipun ada kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas kelapa sawit, seperti subsidi pupuk, pemberian bibit unggul, dan pendampingan teknis, manfaatnya belum dirasakan secara merata, terutama oleh petani kecil. Fluktuasi harga kelapa sawit yang tidak stabil dan keterbatasan akses terhadap teknologi serta pembiayaan menjadi masalah utama yang dihadapi petani kecil. Selain itu, ketimpangan antara petani besar dan kecil semakin memperburuk kondisi ekonomi petani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memberikan akses yang lebih besar kepada petani kecil terhadap fasilitas yang ada, serta mendorong keberlanjutan lingkungan dalam praktik perkebunan kelapa sawit. Perbaikan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan di Lampung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen, teman, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif*. Penerbit Salemba.
- Anggraini, W., Lambelanova, R., & Ritonga, N. A. (2022). Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 72–92.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor November 2022*.
- Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. (2022). (*RENSTRA*) *DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 – 2024*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harahap, P. F., Hadi, S., & Rosnita, R. (2023). Dampak Kenaikan Harga Pupuk terhadap Produktifitas Kelapa Sawit Kabupaten Pelalawan. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(5), 383–391. <https://doi.org/10.37149/jia.v8i5.870>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Offset.

JURNAL EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS (JUEPA)

Vol. 1 No. 2 Juli 2024

e- ISSN: 3063-1920 (online)

- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–236.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Setiawati, S., Agustina, F., & Evahelda, E. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.33019/jia.v2i1.1121>
- Siradjuddin, I. (2015). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agroteknologi*, 5(2), 7–14. <https://doi.org/10.24014/ja.v5i2.1349>
- Sukowati, N. N. S. (2022). Pengaruh Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) terhadap Efek Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(3), 282–296. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.05>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>